

# AL-DA'IM

*Membangun Profesionalisme Manajemen Dakwah*

*Vol. 3, No. 1, Januari - Juni 2017*

**MITRA BESTARI**

Prof. Dr. Heru Kurnianto Tjahjono, MBA (*Universitas Muhammadiyah Yogyakarta*)  
Dra. Imas Maesaroh, Dip.IM-Lib, M.Lib, Ph.D (*UIN Sunan Ampel, Surabaya*)  
Drs. Achmad Tohirin, MA, Ph.D (*Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta*)  
Alimatul Qibtiyah, M.Si, MA, Ph.D (*UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta*)  
Dr. Mohammad Nuh, M.Si, D.Pol.Sc (*Universitas Brawijaya, Malang*)  
Dr. Okrisal Eka Putra, Lc, M.Ag (*UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta*)

**PEMIMPIN REDAKSI**

Andy Dermawan, M.Ag

**SEKRETARIS REDAKSI**

Bayu Mitra A. Kusuma, MAP, M.Pol.Sc

**DEWAN REDAKSI**

Drs. M. Rosyid Ridla, M.Si, Aris Risdiana, MM., Munif Solikhan, MPA  
Achmad Muhammad, M.Ag., Nurmahni, M.Ag

**ADMINISTRASI DAN DISTRIBUSI**

Tejawati, SH

**ALAMAT REDAKSI**

Jurusan Manajemen Dakwah, Fakultas Dakwah dan Komunikasi  
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Kampus Timur  
Jl. Marsda Adisucipto, Yogyakarta 55281, Telp. (0274) 515856  
<http://ejournal.uin-suka.ac.id/JMD>

Jurnal MD Terindeks oleh



**Jurnal MD** menerima tulisan mengenai hasil pemikiran dan hasil penelitian di bidang kajian Manajemen, Manajemen Dakwah dan Studi Islam. Naskah harus asli (belum pernah dipublikasikan) dan ditulis menggunakan bahasa Indonesia dengan menggunakan kaidah penulisan karya ilmiah; efektif, efisien, akademis dan dapat dipertanggungjawabkan. Naskah diketik dengan huruf Times New Roman, ukuran 12 pts, dengan spasi 1,5 spasi, dicetak pada kertas kuarto (A4) sepanjang maksimum 25 halaman (include Daftar Pustaka), dan diserahkan dalam bentuk print-out sebanyak 3 eksemplar beserta filenya. Berkas (file) dibuat dengan Microsoft Word (ekstensi RTF)

# DAFTAR ISI

Kata Pengantar	v
Daftar Isi	vii
STRATEGI UNITED SABAH ISLAMIC ASSOCIATION (USIA) DALAM MENGEMBANGKAN DAKWAH DI KOTA KINABALU MALAYSIA <i>Juhari Hasan dan Muhd. Syahrul Nizam</i>	1-18
PENGARUH KOMPENSASI FINANSIAL DAN NON FINANSIAL TERHADAP MOTIVASI DAN KINERJA KARYAWAN (Studi di PT. PLN (Persero) Area Malang) <i>Juni Tristanto Laksana Putra</i>	19-34
ETIKA KERJA ISLAM DAN PENGARUHNYA TERHADAP <i>ORGANIZATION CITIZENSHIP BEHAVIOR</i> APARATUR NEGARA (Studi di Kantor Kementerian Agama Kebumen) <i>Fawzi Rizki Pradana dan Mikhriani</i>	35-49
PENGARUH KEADILAN DISTRIBUTIF DAN PROSEDURAL PENILAIAN KINERJA PADA KEPUASAN KARYAWAN BPR SYARIAH DI YOGYAKARTA <i>Ade Gunawan dan M. Thoriq Nurmadiansyah</i>	51-64
MENGARUSUTAMAKAN PELAYANAN PRIMA DI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA (Analisis Strategi Fakultas Dakwah dan Komunikasi) <i>Siti Fatimah dan Munif Solikhan</i>	65-80
THE RISING OF BANK BAITULMAL: AN INTEGRATIVE INSTITUTION FOR POVERTY ALLEVIATION <i>Israk Ahmadsyah</i>	81-97

KAJIAN POTENSI DAN STRATEGI PENGEMBANGAN  
WISATA PANTAI SYARI'AH

(Studi di Pulau Santen Kabupaten Banyuwangi)

*Firdausia Hadi dan M. Khoirul Hadi al-Asy Ari*

99-116

RESENSI BUKU

(RE)DESAIN MANAJEMEN HAJI INDONESIA:  
DARI MASA KOLONIAL HINGGA ORDE REFORMASI

*Theresia Octastefani dan Bayu Mitra A. Kusuma*

117-121

## RESENSI BUKU

### (RE)DESAIN MANAJEMEN HAJI INDONESIA: DARI MASA KOLONIAL HINGGA ORDE REFORMASI

**Theresia Octastefani**

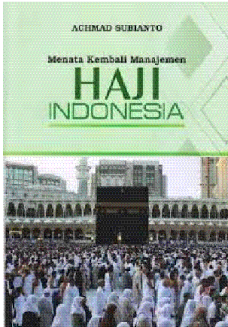
*Departemen Politik dan Pemerintahan, Universitas Gadjah Mada,  
Yogyakarta*

*Email: theresiaoctastefani@ugm.ac.id*

**Bayu Mitra A. Kusuma**

*Jurusan Manajemen Dakwah, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta*

*Email: bayu.kusuma@uin-suka.ac.id*



Judul : Menata Kembali Manajemen Haji Indonesia  
Penulis : Achmad Subiyanto  
Penerbit : Gibon Books  
Tebal : 378 Halaman  
Cetakan : Mei 2016  
Kota Terbit : Jakarta  
ISBN : 978-979-773-046-8

Dari masa ke masa, upaya menata kembali manajemen haji terus disuarakan oleh berbagai stakeholder. Mulai dari pemerintah selaku otoritas penyelenggara yang menghubungkan dengan pihak Arab Saudi sebagai tuan rumah, biro-biro swasta penyedia paket layanan haji, sampai dengan masyarakat selaku pengguna layanan. Namun upaya itu kerap dipandang kurang maksimal, terutama pada pihak pemerintah melalui Kementerian Agama. Kendati di berbagai media cetak maupun elektronik permasalahan haji kerap diulas begitu mendetail dan melibatkan banyak usulan, namun faktanya hingga saat ini permasalahan dalam penyelenggaraan ibadah haji masih saja terus terdengar.

Padahal upaya untuk menata pelaksanaan haji telah dilakukan sejak masa kolonial hingga orde reformasi yang sudah nyaris memasuki satu

dekade ini. Rentang waktu yang cukup panjang dalam melihat perkembangan pengelolaan ritual Islam dengan label hubungan internasional ini. Karena itulah buku karya penulis Achmad Subiyanto ini mengklasifikasikan periode penataan haji menjadi dua, yaitu periode pra kemerdekaan dan pasca kemerdekaan. Memang kapan persisnya umat Islam Indonesia mulai melakukan perjalanan ibadah haji ke tanah suci belumlah dapat teridentifikasi dengan pasti. Informasi terkuat yang dapat dihimpun adalah sekitar abad ke-12 dimana kerajaan-kerajaan bercorak Islam mulai bermunculan di bumi Nusantara. Namun demikian dapat dipastikan bahwa jauh bertahun-tahun sebelum proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia dikumandangkan pada tanggal 17 Agustus 1945, umat Islam Indonesia telah menjalankan ibadah haji. Pada zaman tersebut, transportasi laut menjadi sarana utama dengan durasi perjalanan sekitar satu bulan.

Secara karakteristik, jama'ah haji asal Indonesia dikenal dengan berbagai keunikan. Indonesia adalah dengan jumlah umat Islam terbesar di dunia dimana apabila ditarik sebuah garis lurus imajiner maka posisinya berada paling timur dari Makkah dan Madinah yang merupakan kota suci pusat peribadatan umat Islam dunia. Semakin kesini, Indonesia dikenal sebagai negara dengan hasrat untuk menunaikan ibadah haji yang besar. Di Indonesia, fakta menunjukkan bahwa banyak orang yang pada akhirnya dapat menunaikan ibadah haji melalui cara menabung. Tidak main-main, proses menabung tersebut dapat melalui jangka waktu hingga puluhan tahun. Hal ini menunjukkan bahwa muslim Indonesia memiliki kesabaran dan harapan yang begitu besar untuk dapat menjadi tamu Allah di tanah suci. Pada akhirnya usaha keras dan penuh kesabaran tersebut tidaklah sia-sia.

Berbicara tentang penataan dan redesain manajemen haji, dari masa kolonial sampai dengan era reformasi, penyelenggaraan manajemen haji di Indonesia masih dikelola melalui manajemen pemerintahan yang sangat birokratis. Akibatnya penyelenggaraan haji di Indonesia dari waktu ke waktu masih dipandang mengalami stagnansi atau tidak mampu menjadi lebih baik. Manajemen haji Indonesia masih terus berkubang ke dalam lubang masalah yang sama. Oleh karenanya, sudah saatnya penyelenggaraan haji yang dipandang sudah mengarah kepada 80%-85%

bisnis dan hanya 15%-20% yang bersifat ibadah itu beralih orientasi. Tidak lagi menggunakan prinsip *new public management* yang berorientasi pada pelanggan, namun menggunakan *new public service* yang lebih berorientasi kepada efisiensi dan pelayanan serta sebesar-besarnya ditujukan untuk kesejahteraan umat.

Penataan manajemen haji di Indonesia sudah saatnya dilakukan dengan focus pada empat aspek meliputi pendanaan, pelatihan, penyelenggaraan baik saat di dalam negeri maupun di luar negeri, serta pasca haji. Mengapa pasca haji menjadi poin penting? Hal ini karena meskipun jama'ah sudah selesai melakukan ibadah Haji, namun alangkah baiknya jika mereka masih tetap menyisihkan sebagian hartanya dengan niat tetap untuk haji dan umroh melalui Badan Penyelenggaraan Tenaga Haji (BTPH) dimana dana tersebut nantinya dapat dimanfaatkan untuk membantu para anak yatim serta fakir miskin. Atau tidak menutup kemungkinan untuk diberikan kepada mereka yang telah mengupayakan pergi haji namun masih terkendala masalah finansial. Sehingga pengelolaan pasca haji ini selain untuk tetap memperkuat persaudaraan antara jama'ah haji juga mampu menjadi manifestasi dari fitrah kasih sayang sesama manusia dan upaya membangun solidaritas sosial.

Namun yang menjadi masalah adalah justru pemerintah dan umat Islam sendiri sering mengabaikan prinsip berjamaah itu sendiri. Hal ini tidak begitu saja terjadi sebenarnya. Hal ini terjadi karena upaya dalam mengelola kepentingan masyarakat secara berjamaah justru kerap dituding sebagai upaya monopoli. Ambillah contoh beberapa Badan Usaha Milik Negara seperti PLN, Taspen, dan beberapa lainnya. Monopoli dianggap selalu merugikan, tidak efisien, tidak demokratis, dan bertentangan dengan mekanisme persaingan pasar. Pemahaman tersebut hingga kini masih bersarang dalam pemikiran para pemangku kebijakan maupun politisi kita. Padahal kalau sudah berbicara masalah atau kepentingan masyarakat luas, pemerintah tidak perlu takut dengan cap monopoli dan sejenisnya. Dalam hal ini pemerintah dan umat perlu mencari titik temu agar redesain manajemen haji dapat memberikan manfaat bagi semua pihak. Konsep masalah memang harus dikendalikan oleh orang yang tepat. Karena bila dikendalikan oleh manusia yang tidak baik akhlakunya, maka penerapannya pun menjadi tidak benar

sehingga output yang dihasilkan pun menjadi tidak optimal. Sehingga dalam hal ini diperlukan *the right man in the right place*.

Dari tahun ke tahun, sejak masa kolonial hingga kini orde reformasi dekade, persoalan terkait penyelenggaraan ibadah haji datang silih berganti. Misalnya saja yang terjadi menjelang musim haji tahun 2015. Salah satu problem yang paling sering muncul adalah terkait dengan bidang administrasi keimigrasian. Visa jamaah haji kerap belum terbit sampai dengan menjelang keberangkatan ke tanah suci. Keterlambatan penerbitan visa tersebut membawa beberapa konsekuensi, misalnya: tertundanya keberangkatan jamaah sehingga terpisah dari rombongan bahkan keluarganya; meningkatnya kecemasan dan stress akibat ketidakpastian; reaksi negatif masyarakat yang berakibat pada menurunnya kepercayaan pada Kementerian Agama sebagai institusi pengelola haji. Pada tahun 2016, kasus keimigrasian semakin kompleks tatkala terkuaknya pemalsuan dokumen jamaah haji asal Indonesia dengan menggunakan paspor Filipina.

Dintinjau dari segi kualitas konten, buku ini memiliki kelebihan maupun kekurangan. Salah satu kelebihan mendasar dari buku ini adalah menggunakan bahasa yang sederhana sehingga dapat dinikmati oleh berbagai kalangan, bukan hanya akademisi, namun juga praktisi dan masyarakat awam. Kelebihan lainnya adalah bahwa buku ini memiliki cakupan yang cukup mendetail mengenai perkembangan manajemen haji di Indonesia. Penulis mampu meruntutkan bagaimana perkembangan serta redesain manajemen haji sejak masa kolonial hingga era reformasi. Terlebih penulis juga memberikan contoh riil melalui beberapa pengalaman orang bisa naik haji dengan berbagai cara. Namun tiada gading yang tak retak. Buku inipun memiliki kelemahan. Kelemahan buku ini adalah kurangnya referensi untuk memperjelas dari mana sumber penulisan buku ini sekaligus meyakinkan pembaca tentang keabsahan data yang dinarasikan dalam buku ini. Kelemahan lainnya adalah di balik bahasannya yang cukup sederhana untuk dipahami, masih ditemukan beberapa kalimat yang diulang dan berbelit sehingga membingungkan pembaca.

Yang patut diapresiasi dari terbitnya buku ini adalah adanya manfaat yang didapatkan oleh pembaca. Beberapa manfaat yang bisa didapatkan



dari membaca buku ini adalah: *Pertama*, kita dapat mengetahui secara mendetail sejarah perkembangan dan redesain pengelolaan ibadah haji di Indonesia. Dengan memahami sejarahnya, maka kita dapat mengetahui dimana posisi kondisi saat ini, apakah lebih baik, stagnan, atau malah mengalami kemunduran. *Kedua*, dari buku ini kita dapat memperoleh informasi mengenai permasalahan-permasalahan yang timbul dalam narasi panjang pengelolaan haji di Indonesia. Namun yang menjadi catatan adalah bahwa setelah kita mampu mengidentifikasi permasalahan yang timbul, maka kita juga harus memformulasikan solusinya. Hal tersebut tidak hanya menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah, namun juga seluruh *stakeholder* yang terlibat dalam pelaksanaan ibadah haji.